

RUAS JALAN BEKELAN-MAITAN
Tetap Dibangun Akhir 2021



KR-Alwi Alaydrus

Kondisi jalan Maitan Tambakromo yang rusak parah.

PATI (KR) - Setelah melalui kajian cukup lama, jalan Beketel (Kecamatan Kayen) sampai Maitan (Kecamatan Tambakromo) dan jalan menuju objek wisata Kebun Kopi Jolong lewat Desa Pohgading (Kecamatan Gembong) dipastikan tetap dibangun pada akhir 2021. Dua paket pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut sebelumnya dibatalkan karena belum adanya kepastian bantuan keuangan dari Provinsi Jateng.

Paket proyek peningkatan ruas jalan Beketel-Maitan dengan pagu Rp 9 miliar, sedangkan pagu ruas jalan Pohgading-Jolong Rp 5 miliar. Kepala Seksi Jalan Bidang Binamarga DPUTR Pati, Hasto Utomo mengungkapkan dua paket pekerjaan tersebut diberlakukan beberapa syarat. Di antaranya, rekanan pemenang tender dalam bekerja tiap hari harus mengerahkan sedikitnya 150 pekerja. "Ini dikarenakan, hari kalender pekerjaan hanya tersedia selama 60 hari" jelasnya, Selasa (12/10).

Hasto Utomo juga menyatakan, sampai sekarang proses tahapan tender paket pekerjaan itu baru tayang di Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). Karena itu harus melalui proses tahapan yang diharapkan selesai maksimal dua pekan terakhir bulan ini. "Diperkirakan, penandatanganan kontrak pada 27 Oktober sedangkan waktu pelaksanaan harus sudah berakhir 27 Desember 2021," tandasnya.

Menurutnya, paket ruas jalan Beketel-Maitan panjangnya tidak kurang dari 7 kilometer dan ada pekerjaan pembeconan untuk pelebaran badan jalan, baik sisi kiri maupun kanan. Juga ada pekerjaan pembuatan talut, karena kondisi ruas jalan yang sempit sehingga harus ada talut penahan. **(Cuk)**

PENYIDIK KPK 'NGUBLEK-UBLEK' BANJARNEGARA

Rehabilitasi Pasar Sayur Minta Diopname

BANJARNEGARA (KR) - PT Sutikno Tirta Kencana Banjarnegara mengajukan surat pengajuan opname atau pemeriksaan terhadap hasil dari pekerjaan proyek Rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara kepada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di tengah banyaknya sorotan terhadap proyek tersebut karena diduga keras dalam prosesnya terjadi maladministrasi.

Pelaksana Rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara kemudian mengirimkan surat permohonan opname pada Senin 11 Oktober 2021 atau hari terakhir jadwal pelaksanaan proyek. "Kami masih menunggu jawaban dari Dinas PUPR," kata Budhi Irawan selaku pelaksana PT Sutikno Tirta Kencana, Selasa (12/10).

Sebelumnya, pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR menghentikan kegiatan Rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara mulai tanggal 13 September 2021, setelah menjadi sorotan DPRD karena diduga keras dalam prosesnya terjadi maladministrasi.

Pasar Sayur Banjarnegara terbakar Kamis 11 Maret 2021, mengakibatkan 800 los dan 141 kios hangus berikut isinya. Total kerugian para pedagang sekitar Rp 19 miliar. Belakangan, Pemkab Banjarnegara melalui Dinas PUPR menunjuk PT Sutikno Tirta Kencana untuk mengerjakan proyek Rehabilitasi Pasar Sayur, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Mulail Kerja (SMPK) Nomor 5/SPMK/PSR/PUPR/2021 tertanggal 15 Mei 2021. Jadwal pelaksanaan selama 150 hari, mulai 15 Mei 2021 hingga 11 Oktober 2021.

Pemkab Banjarnegara melakukan penunjukkan langsung pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Pasar Sayur dengan alasan kondisi darurat. Namun penunjukan langsung dinilai menyalahi aturan karena tidak ada dokumen hasil laboratorium forensik Polri tentang penyebab kebakaran pasar sayur tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Edy Purwanto, dokumen dokumen hasil laboratorium forensik harus ada sebagai syarat untuk penunjukan

langsung.

Tidak adanya dokumen tersebut, lanjut Wedy Purwanto, Pemkab juga tidak dapat mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi atas terbakarnya Pasar Sayur Banjarnegara, sekitar Rp 2 miliar. "DPRD juga telah berkonsultasi ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Semarang dan mendapat penjelasan bahwa telah terjadi maladministrasi terkait Rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara. Kegiatan harus dihentikan dan dilakukan tender," tandasnya.

Budhi Irawan selaku pelaksana PT Sutikno Tirta Kencana membenarkan tentang pengajuan opname pekerjaan Rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara. Hasil opname akan menjadi dasar pembayaran pekerjaan. Progres pekerjaan mencapai 75 persen dan telah menghabiskan biaya sekitar Rp 14 miliar dari anggaran Rp 19,4 miliar.

Sementara itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Sabtu lalu hingga Selasa (12/10) ngublek-ublek Banjarnegara.

Mereka dengan melakukan pengeledahan di berbagai tempat berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dengan tersangka bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono.

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi.

Sabtu (9/10), penyidik KPK mengeledah empat lokasi, yakni rumah kediaman pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang berada di Desa Kalipelus, Bandingan Rakit, Parakancangah, dan Desa Twelagiri. Kemudian Senin (11/10), KPK melakukan pengeledahan ruang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang berada di kompleks kantor Bupati Banjarnegara. Selasa (12/10), penyidik KPK mengeledah rumah seorang pengusaha jasa konstruksi di Batur Dieng dan rumah mantan Kepala Dinas PUPR Tatag Rochyadi di Kebanaran Mandiraja. **(Mad)**

UNTUK PERCEPAT PENANGANAN COVID-19

Temanggung Minta Tambahan Vaksin

TEMANGGUNG (KR) - Bupati Temanggung Al Khadziq Temanggung minta tambahan vaksin Covid-19 kepada Menkes RI Budi Gunadi Sadikin sebanyak 120 ribu dosis. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran kementerian kesehatan.

"Dalam penanganan Covid-19, ketersediaan vaksin dan langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini antara lain meibatkan berbagai pihak seperti Polres Temanggung dan Kodim 0706 Temanggung. Dan yang terpenting

adalah, target vaksinasi dalam beberapa hari ke depan," kata Al Khadziq, Selasa (12/10).

Bupati Temanggung mengungkapkan, pihaknya sengaja ke Jakarta untuk minta tambahan vaksin Covid-19 minimal 120 ribu dosis. Targetnya, segera tercipta *herd immunity* dan cakupan vaksinasi bisa mencapai lebih dari 50 persen.

"Pemerintah Kabupaten Temanggung serius dalam penanganan Covid-19. Adanya tambahan vaksin untuk menurunkan level Temanggung menjadi zona

hijau," tandasnya.

Menurutnya, kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung saat ini tetap landai, Meskipun dmeikian, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Penularan juga sangat rendah, tingkat kematian juga rendah dan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit sangat rendah. "Ini menunjukkan bahwa masyarakat Temanggung sesungguhnya sudah sangat terkendali," tegas Al Khadziq

Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung, Dwi Sukarme mengatakan rombongan Pemkab Temanggung telah mendatangi Kementerian Kesehatan di Jakarta dan bertemu langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Rombongan antara lain terdiri Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto, Plt Dinas Kesehatan Kristi Widodo, Sekretaris Dinas Kesehatan Dwi Sukarme, Sekretaris Dewan Agus Munadi, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup, Djoko Prasetyo. **(Osy)**

HUKUM

Tukang Sampah Gadaikan Motor Sewaan

TEMANGGUNG (KR) - TYT (39) warga Kecamatan Ngadirojo Temanggung ditangkap petugas Polres setempat dengan sangkaan penggelapan sepeda motor. Ia kini mendekam di sel tahanan menunggu proses hukum.

Wakapolres Temanggung Kopol Ahmad Ghifar mengatakan modus operandi tersangka adalah dengan menyewa sepeda motor milik korban. Setelah habis masa sewa tersangka tidak dikembalikan tapi digadaikan pada pihak lain. "Alasannya untuk bekerja, kemudian menyewa sepeda motor dan digadaikan," jelasnya, Rabu (13/10).

Diungkapkan, biaya sewa sepeda motor yang disepakati oleh tersangka dan korban yakni Rp 200 ribu per satu pekan, dan tersangka langsung memberikan uang sewa Rp 400 ribu untuk sewa sepeda motor selama dua pekan.

"Setelah dua pekan, tersangka tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya kepada korban. Bahkan korban sudah baik hati dengan tidak menambah uang sewa karena sudah melebihi waktu sewa. Ketika ditanya korban, tersangka TYT berbelit-belit untuk menyampaikan posisi sepeda motor yang disewanya.

"Sepeda motor milik korban ternyata sudah digadaikan oleh tersangka tanpa sepengetahuan korban," jelasnya. Dari kejadian tersebut lanjut Wakapolres, korban langsung melaporkan perkara ini ke Petugas, kemudian korban langsung dibekuk di rumahnya. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa

sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 6997 KN.

"Tersangka diancam dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara," ujarnya. Tersangka TYT mengaku mengadakan sepeda motor milik korban karena terilit kebutuhan sehari-hari, sebab penghasilannya sebagai pembersih sampah tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangganya. "Terpaksa karena akhir-akhir ini memang sedang susah, cari uang tidak seperti sebelum virus Corona mewabah," akunya.

Sementara itu, petugas unit Reskrim Polsek Pengasih berhasil mengamankan dua pemuda yakni RPP (23) warga Kalidengen Temon dan RD (22) warga Giripurwo Girimulyo. Keduanya diduga telah mencuri speaker aktif di sebuah warung bakso di wilayah Pengasih.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffri, mengatakan petugas berhasil menangkap kedua pelaku di depan kantor Samsat Kulonprogo, Minggu (10/10) malam. Petugas juga menyita barang bukti berupa dua potong kayu teralis jendela dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku.

Kasus ini dapat terungkap bermula saat korban Bambang Wisnu melaporkan kejadian pencurian ke polisi. Korban yang membuka usaha warung bakso dan mie ayam kehilangan sepasang speaker aktif yang berada di dalam warung. Pelaku masuk ke dalam warung dengan cara merusak teralis jendela yang terbuat dari kayu. **(Osy/R-2)**



KR-Zaini Arrosyid

Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolres Temanggung.

Polisi Gerebek Rumah Pembuatan Miras Oplosan

BANTUL (KR) - Petugas Satsamapta Polres Bantul mengamankan 158 botol minuman keras oplosan hasil penggerebegan dari rumah warga di Pedukuhan Neco Sabdodadi Bantul.

Selain miras oplosan, petugas juga mengamankan bahan baku pembuatan miras di antaranya 16 botol alkhohol murni, 1 dos minuman energi dan bahan untuk campuran lainnya.

Menurut Kapolres Bantul, AKBP Ihsan SIK, Rabu (13/10), penggerebegan rumah tempat pembuatan miras oplosan tersebut dilakukan Sabtu (9/10) malam. Berawal adanya informasi dari warga, bahwa di Pedukuhan Neco ada rumah yang dicurigai sebagai tempat membuat miras oplosan.

Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang ditunjukkan oleh warga tersebut dan ternyata informasi itu benar. Petugas langsung melakukan penggerebegan rumah milik SH (50). Di rumah tersebut,

petugas mengamankan 158 botol miras oplosan dan bahan baku pembuatan miras. Kemudian pelaku pembuatan miras dan barang buktinya dibawa ke Polres Bantul.



KR-Judiman

Petugas Polres Bantul mengamankan miras oplosan.

KORUPSI UANG GANTI RUGI JJLS

Uang Rp 5 Miliar untuk Foya-foya Oknum Lurah

WONOSARI (KR) - Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh RS (50) Oknum Lurah Karangawen, Kapanewon Girisubo Gunungkidul, masih terus ditangani oleh pihak kepolisian. Sejumlah saksi diperiksa penyidik dan berdasarkan keterangan tersangka uang ganti rugi lahan JJLS senilai lebih dari Rp 5 miliar milik Kalurahan Karangawen sudah digunakan untuk berbagai keperluan pribadi dan untuk foya-foya.

Kapolres Gunungkidul, AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah SIK, mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami terkait dengan pemanfaatan uang ganti rugi JJLS

di Kalurahan Karangawen yang disalahgunakan oleh RS. "Sejumlah keterangan dari saksi dan dokumen-dokumen yang kami temukan masih terus kami dalam," jelasnya, Rabu (13/10).

Sejak RS menyerahkan diri, pihaknya langsung melakukan penanganan terhadap yang bersangkutan. Berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan JJLS ini, baru ditetapkan 1 orang tersangka yaitu RS.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selama ini, tindak korupsi yang dilakukan ini memang sudah direncanakan oleh RS. Uang itu digunakan untuk membayar utang

terhadap sejumlah pihak, termasuk juga untuk membangun rumah dan foya-foya. Sejak kasusnya mencuat, yang bersangkutan pergi ke Kalimantan kemudian kembali dan menyerahkan diri ke Polres Gunungkidul. "Proses hukum terus kami lakukan," imbuhnya.

Berkaitan dengan dana yang masuk ke rekening pribadi ini masih diselidiki termasuk dengan penyimpangan lainnya. Dana ganti rugi JJLS untuk tanah milik Kalurahan Karangawen sebanyak Rp 7,1 miliar masuk ke rekening pribadi tersangka RS. Kemudian dana tersebut hanya disetorkan ke rekening desa sebesar Rp 1,8 miliar. **(Bmp)**